

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANGSI
PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Empiris PadaWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh :

Dedi Mizwar Umar

NPM. 21701082173



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG 2021**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANGSI
PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang)

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh :

Dedi Mizwar Umar

NPM. 21701082173



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
MALANG
2021**

ABSTRAK

Dengan perkembangan zaman sekarang ini itu adalah salah satu yang membuat masyarakat terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu kebutuhannya yang termasuk penting pada saat ini yaitu alat transportasi. Alat transportasi sangat penting agar dapat mempermudah semua urusan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah di kalangan masyarakat, karena sudah kita ketahui saat ini sudah banyak masyarakat di kalangan menengah maupun bawah sudah banyak memiliki kendaraan bermotor.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive dengan 120 responden yang merupakan wajib pajak di Kota Malang. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Malang.

Kata Kunci : Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kepatuhan Wajib Pajak.



ABSTRACT

With the development of today's era it is one that makes people motivated to be able to meet all their needs. One of the most important needs at this time is a means of transportation. Transportation is very important in order to facilitate all the affairs of the community. Transportation equipment such as motorized vehicles is no longer a luxury item among the people, because we already know that many people in the middle and lower classes already have many motorized vehicles.

The sampling technique was carried out by the proportional method with 120 respondents who were taxpayers in the city of Malang. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions and public service accountability have a positive effect on taxpayer compliance with motorized vehicles in Malang.

Keywords : Tax Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions and Public Service Accountability Taxpayer Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG ATAU PENELITIAN

Pajak adalah suatu keharusan bersifat memaksa yang harus dibayar oleh setiap warga Negara Indonesia. Dengan Perkembangan zaman yang semakin maju membuat masyarakat indonesia semakin terobsesi untuk memenuhi segala kebutuhannya, kebutuhan yang mendesak berupa adalah sarana. Transportasi sangat penting untuk memperlancar segala urusan kita. Sarana transportasi seperti kendaraan bermotor, bukan lagi barang yang glamor di kalangan masyarakat sekarang ini. karena sudah kita ketahui saat ini sudah banyak masyarakat di kalangan menengah maupun bawah sudah banyak memiliki kendaraan bermotor.

Oleh karena itu minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin banyak. Akibatnya jumlah WP kendaraan bermotor juga semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dengan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor tentunya pasti berdampak baik terhadap daerah dan Negara karena akan menambah jumlah pendapatan Negara dan daerah khususnya di sektor PKB. PKB yang dibayar oleh setiap WP itu akan digunakan untuk kepentingan daerah, contohnya pembangunan jalan, jembatan dan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah. Selain dari sektor PKB pendapatan daerah juga ada dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan digunakan untuk melakukan agenda – agenda daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2013), pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara yang bersifat memaksa, pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah yang sangat penting dalam pertumbuhan atau perkembangan suatu daerah dan Negara. Pajak memiliki

karakter penting bagi Negara kita sebagai salah satu alternatif pendapatan negara dan kapasitas untuk mengontrol atau mengatur latihan keuangan di kemudian hari. Organisasi pemerintah, administrasi publik, dan perbaikan lokal disubsidi dari area penilaian. Di Indonesia sendiri, hampir semua daerah menyelidiki kemampuan pembayaran teritorial melalui retribusi lingkungan, dengan cara ini pemerintah daerah berusaha untuk memperluas kemungkinan sumber pembayaran provinsi. Namun semakin banyak WP kendaraan bermotor semakin banyak juga yang menunggak pembayaran pajaknya.

Menurut Ilhamsyah (2016) ketaatan WP adalah tempat di mana warga negara memenuhi komitmen pengeluaran mereka dan melakukan hak kewajiban mereka dengan tepat dan efektif sesuai pedoman penilaian dan undang-undang yang bersangkutan, sementara resistensi biaya dapat diartikan sebagai keadaan di mana warga negara tidak memenuhi semua kewajiban komitmen. juga, hak ketetapan pajak. Konsistensi warga merupakan faktor yang signifikan untuk memperluas retribusi, maka penting untuk mempertimbangkan motivasi pada variabel-variabel yang mempengaruhi konsistensi warga, khususnya dalam berbuat baik pada retribusi lingkungan (Mahaputri dan Noviari, 2016).

Kesadaran pajak adalah suatu pemahaman yang ada di diri seorang WP untuk membayarkan kewajibannya sebagai warga Negara. Kesadaran merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi ketaatan WP dalam membayarkan kewajibannya.

Pengetahuan pajak adalah salah satu intelektual yang dimiliki seorang WP karena pengalaman dan ilmu yang telah didapatkan, pengetahuan pajak sangat penting dalam meminimalisir ketidak patuhan seorang WP di suatu daerah (Aswati dkk, 2018).

Sangsi pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ketaatan WP termasuk salah satu cara yang sangat bagus dalam meminimalisir ketidak taatan seorang WP. Menurut Widodo (2016) perwujudan sangsi pajak dapat membawa dampak baik terhadap ketaatan WP karena mereka akan berpikir kalau semisalnya mereka tidak membayar pajak mereka akan mendapatkan sangsi yang berat contohnya berupa denda untuk yang tidak membayarkan pajak. Sangsi perpajakan adalah cagar satu diantara yang ada yang bahwa aturan UU perpajakan akan dipenuhi dan ditaati. Sangsi pajak adalah sarana pencegahan WP tidak melanggar peraturan perpajakan.

Akuntabilitas pelayanan publik yaitu salah satu variabel yang mempengaruhi ketaatan WP, karena pelayanan yang baik itu sangat dibutuhkan dalam seseorang WP untuk mematuhi kepatuhan membayar pajak, karena dengan pelayanan yang baik itu untuk mempermudah WP untuk membayarkan pajaknya.

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membutuhkan suatu pelayanan yang baik oleh aparatur perpajakan (Mahaputri dkk, 2016). Ketaatan WP dalam membayar pajak itu tergantung dari pelayanan yang dilakukan pada saat pembayaran pajak, dan adanya pemahaman mengenai pajak karena dengan adanya itu pasti WP akan bersemangat untuk membayarkan pajaknya khususnya pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan fakta atau data yang di dapatkan di kota malang untuk jumlah kendaraan bermotor, dan jumlah WP yang menunggak pajak dari tahun ke tahun di bawah ini.

Tabel 1. 1

Jumlah Kendaraan Roda Dua Kota Malang

Periode	Jumlah
2017	344.621
2018	352.879
2019	355.345

Sumber : badan pusat statistik kota malang, tahun 2019

Tabel 1 : Jumlah Kendaraan Roda Dua Kota Malang

Berdasarkan data yang didapatkan dari badan pusat statistic kota malang di atas di tahun 2017 jumlah WP kendaraan sepeda motor mencapai 344.621 WP. Lalu di tahun 2018 mengalami kenaikan 2,39% yaitu total kenaikannya 8.258 WP dan di tahun 2019 mengalami kenaikan 0,69% yaitu total kenaikannya 2.466 WP sepeda motor. Hal ini dapat disimpulkan semakin kesini semakin banyak minat masyarakat kota malang untuk memiliki sepeda motor demi untuk membantu aktivitas dan urusanya.

Dengan meningkatnya minat masyarakat kota malang untuk kendaraan roda dua itu berpengaruh positif terhadap daerah, karena bertambah banyak jumlah WP kendaraan bermotor khususnya roda dua sehingga semakin meningkatnya penerimaan pendapatan daerah.

Tabel 1. 2

Potensi Pendapatan PKB

(Sepeda Motor) Kota Malang

Periode	Potensi Pendapatan
2017	Rp 61.993.067.630
2018	Rp 64.863.403.402
2019	Rp 67.100.347.561

Sumber : badan pusat statistik kota malang, tahun 2019

Tabel 2 : Potensi Pendapatan PKB

Dari data diatas dapat disimpulkan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 potensi pendapatan PKB semakin bertambah. Pada tahun 2017 total pendapatannya Rp.61.993.067.630, Tahun 2018 total pendapatannya Rp.64.863.403.402, berarti menunjukkan bahwa adanya peningkatan Rp.2.870.335.772 (4,63%) semenjak tahun 2017. Dan dari tahun 2018 ke 2019 memiliki peningkatan yaitu Rp..2.236.944.159 (3,44%) sejak tahun 2018. Dari data yang tercatat

dapat disimpulkan bertambahnya kuantitas WP kendaraan bermotor, potensi penerimaan pajak khususnya PKB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Seharusnya penerimaan ini tetap optimal, apabila adanya ketaatan dari WP untuk membayarkan kewajibannya, karena terhitung dari tanggal 31 Des 2017 sampai dengan Des 2019 itu masih banyak yang menunggak pembayaran, jadi penerimaannya tidak optimal atau pendapatannya tidak sesuai dengan potensi pendapatan yang didata

Tabel 1. 3

Realisasi Penerimaan Pajak PKB (sepeda motor) Kota Malang

Periode/31 Des	Penerimaan PKB (R2)	presentase
2017	Rp.52.300.419.683	84,36%
2018	Rp.54.597.935.023	84,17%
2019	Rp.55.955.840.323	83,39%

Sumber : badan pusat statistik kota malang, tahun 2019

Dari data di atas dapat disimpulkan pendapatan PKB di tahun 2017 sebesar Rp.52.300.419.683 (84,36%) sedangkan di tahun 2018 penerimaan pajaknya sebesar Rp.54.597.935.023 (84,17%) dan 2019 Rp.55.955.840.323 (83,39%), jadi dari data yang ada dapat kita simpulkan realisasi penerimaan PKB khususnya roda dua mengalami penurunan dari tahun ke tahun ini diakibatkan karena kurangnya kepatuhan untuk membayar

Tabel 1. 4

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) Kota Malang

Periode/31 Des	Total tunggakan	Prosentase
2017	Rp.9.692.647.947	15,64%
2018	Rp.10.265.468.380	15,83%
2019	Rp.11.144.507.238	16,61%

Sumber : badan pusat statistik kota malang, tahun 2019

Dari tabel realisasi penerimaan pajak diatas mengapa dari tahun ke tahun mengalami penurunan ini dikarenakan masih banyak WP kendaraan bermotor yang menunggak untuk membayarkan kewajibannya. Dapat dilihat dari data tersebut di tahun 2017, jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 9.692.647.947 atau setara dengan 15,64%, Pada tahun 2018, jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 10.265.468.380 atau 15,83% sedangkan Pada tahun 2019, jumlah tunggakan sebesar Rp 11.144.507.238 atau 16,61% dari hasil riset tersebut kita dapat menyimpulkan mencapai realisasi penerimaan pajak di kota malang dari tahun 2017 - 2019 mengalami penurunan itu dikarenakan dari tahun 2017 – 2019 WP yang menunggak untuk membayar pajak semakin bertambah

Kendaraan bermotor khususnya roda dua dari tahun ke tahun memiliki perkembangan khususnya dikota malang. Semakin banyak WP kendaraan bermotor di kota malang harusnya

pemerintah daerah mendapatkan pendapatan daerah dari sektor PKB dengan nilai yang cukup besar, akan tetapi nyatanya masih banyak WP kendaraan bermotor yang menggunakan kewajibannya untuk membayar pajak itu dikarenakan kurangnya kepatuhan dari setiap individu WP. jadi penerimaan PKB yang ada di kota malang tidak efektif. Ketidaktaatan ini dilihat dari masih banyak yang menunggak pembayaran pajak khususnya PKB R2 yang ada di kota malang. Berdasarkan data fakta yang ada tersebut peneliti menyimpulkan variabel apa saja yang berpengaruh positif terhadap permasalahan tersebut, variabelnya yaitu kesadaran WP, pengetahuan pajak, sangsi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kesadaran Pajak merupakan suatu variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Asmawati dkk (2018) melakukan penelitian yang menyatakan jika variabel kepatuhan WP di pengaruhi baik oleh variabel kesadaran pajak, namun pada penelitian lain yang diteliti (ghailina 2018) menyatakan bahwa variabel kepatuhan pajak tidak dipengaruhi baik oleh variabel kesadaran pajak

Asmawati dkk (2018) melakukan penelitian yang menyatakan jika variabel pengetahuan pajak berdampak baik bagi ketaatan WP dalam membayar pajak, sedangkan penelitian (Danarsi dkk, 2017) menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap ketaatan WP. Pada penelitian yang dilakukan oleh ghailini dkk 2018 menyimpulkan bahwa variabel sangsi pajak berpengaruh baik (positif) terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak, sedangkan Rahadyan dkk, 2016 menyimpulkan bahwa variabel kepatuhan WP tidak dipengaruhi secara positif oleh variabel sangsi pajak. Serta (septiani 2017) menyimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki dampak yang baik bagi ketaatan WP sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan Asmawati dkk 2018 menyimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan WP

Riset ini berfokus pada penelitian yang dilakukan Asmawati dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel bebas maupun terikat yang meliputi kesadaran WP, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh baik (positif) terhadap kepatuhan seorang WP dalam membayarkan pajaknya. Dari perbandingan dari riset yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat banyak perbedaan didalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini antara lain: **Pertama**, pada penelitian ini menambahkan variabel bebas meliputi kesadaran WP, pengetahuan WP, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik.. **Kedua**, peneliti melakukan penelitiannya di kota malang karena dengan fakta dari data yang didapatkan masih banyak WP khususnya PKB masih menunggak pembayaran pajaknya

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti ingin membuktikan bahwa pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik apakah berpengaruh bagi tingkat kesadaran WP untuk membayar pajak. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian diatas maka saya ingin mengkaji lagi tentang variabel apa saja yang dapat meningkatkan ketaatan WP dengan judul “PENGARUH KESADARAN WP, PENGETAHUAN PAJAK, SANGSI PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB PKB

1.1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan Berdasarkan latar belakang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran WP, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh bagi ketaatan PKB?

2. Apakah variabel bebas yaitu (kesadaran WP) berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu ketaatan (kepatuhan WP) kendaraan bermotor?
3. Apakah variabel bebas yaitu pengetahuan pajak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu ketaatan (kepatuhan WP) kendaraan bermotor?
4. Apakah variabel bebas yaitu variabel sangsi perpajakan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu ketaatan (kepatuhan WP) kendaraan bermotor?
5. Apakah variabel bebas yaitu variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh bagi variabel terikat yaitu ketaatan (kepatuhan WP) kendaraan bermotor?

1.2. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat memahami apakah variabel kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, sangsi perpajakan serta akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib PKB.
2. Agar dapat memahami apakah variabel kesadaran WP berpengaruh secara parsial terhadap ketaatan wajib PKB.
3. Agar dapat memahami apakah variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap ketaatan wajib PKB.
4. Agar dapat memahami apakah variabel sangsi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap ketaatan wajib PKB.
5. Agar dapat memahami apakah variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh secara parsial terhadap ketaatan wajib PKB.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Tingkatkan pengetahuan dan per kaya pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi pajak dan pemeriksaan pajak.
2. Memperkuat penelitian yang sudah ada, yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan masukan dan menjadikan Wajib Pajak lebih patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib PKB.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan menambah wawasan informasi yang bermanfaat di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

5. 1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sangsi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib PKB yang ada di kota malang responden dalam penelitian ini 100 orang yang sudah mengisi kuesioner dan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan data yang terkumpul dan diuji dengan menggunakan beberapa model regresi linear, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sangsi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik secara simultan (bersama – sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan WP.
2. Variabel kesadaran pajak pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan WP
3. Variabel pengetahuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan WP
4. Variabel sangsi pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan WP
5. Variabel akuntabilitas pelayanan publik pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan WP

5.2. Saran

1. Sampel pada penelitian selanjutnya lebih baik diperluas lagi, tidak hanya jenis PKB saja tetapi bisa pajak – pajak yang lain
2. Pembagian kuesioner secara langsung kepada WP untuk penelitian selanjutnya
3. Sampel yang diambil kedepannya harus memiliki opsi pengisian yang komplit
4. Sampel yang diambil kedepannya harus lebih banyak dari sebelumnya

5.3. Keterbatasan

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dalam penelitian ini hanya terdiri dari empat variabel, yaitu : kesadaran WP, pengetahuan pajak, sangsi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan masih banyak faktor yang lain yang mempengaruhi kesadaran pajak
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu terkadang yang mengisi kuesioner tidak sesuai dengan kriteria sampel
3. keterbatasan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden sebagai sampel tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Z. (2012). Pengaruh Kesadaran Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 1 : h:1-
- Aswati, Wa Ode, Arifudin Mas'ud, and Tuti Nurdianti Nudi. (2018). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan bermotor(Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan III*:27–39.
- Ghailina, Nur. (2018). "Pengaruh Pengetahuan wajib pajak , Kualitas Pelayanan, Kesadaran Pajak, Dan Saksi Pajak Terhadap Kepayuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *JurnalEkonomi* 1:13.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hendro Subroto, Danarsi, Siti Nurlaela. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 18:45–55.
- Ilhamsyah, dkk. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, Kesadaran Pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No 1
- Indrawan, D. (2014). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang). *JOM FEKON*, 1 (2).
- I Made Wahyu Cahyadi, I Ketut Jati, 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16
- Mahaputri, Noviari. (2016). Pengaruh peraturan perpajakan, Kesadaran Pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol.17.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

- Maulinarhadi, Mirza, Kertahadi, and Fauzi Achmad Mustofa. (2016). "Pengaruh Pengetahuan wajib pajak , Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8:1-7.
- Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma* Vol. 11 No. 02.
- Pranata, Teuku Andre; Mukhlizul Hamdi; Herawati. (2015). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Denda Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor Di Kota Bukit Tinggi." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta* 1-15.
- Rahadyan Fariz, Hirzan (2016). Pengaruh Self Assesment System dan Sanksi Perpajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* (2015)
- Ria, Septiani. (2017). "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi." *E-Jurnal Akuntansi* 1:1-9.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siaahan, Mariot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (pada Kecamatan Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-25.
- Susilawati, Ketut Evi, 2013. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayanti dan Nurlis.2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas.(Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi 13

Wardani, Dewi Kusuma dan Asis, Moh. Rifqi. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Kasus WP PKB Di Samsat Corner Galeria Mall Yogyakarta)”. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1.

Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. (2017). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.” Jurnal Akuntansi 5:15.

